

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Financial Inclusion merupakan satu skema pembiayaan inklusif, dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah. Ragam layanan keuangan tersebut antara lain berupa kredit permodalan, tabungan, asuransi, dan layanan transfer keuangan (Wahid, 2014). Di Indonesia kebijakan inklusi keuangan baru diluncurkan pada tahun 2010, lalu Bank Indonesia juga meluncurkan sebuah program yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan yaitu *National Strategy for Financial Inclusion*.

Kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat pada tingkat bawah untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang, transfer, menabung, pinjaman, dan asuransi. Jadi, inklusi keuangan dapat diartikan sebagai kondisi saat masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan mudah diakses dari persyaratan dan layanan. Maka dari itu, ini dilakukan tidak hanya menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek (Bank Indonesia, 2014).

Istilah keuangan inklusi menjadi tren pasca krisis tahun 2008 terutama didasari dengan adanya dampak krisis kepada kelompok pendapatan rendah dan tidak teratur (tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya

unbanked (belum memiliki akses ke lembaga jasa keuangan) yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju (Bank Indonesia, 2014).

Bank Indonesia mengemukakan faktor-faktor yang dominan didalam keuangan inklusif tersebut (Bank Indonesia, 2013) yakni : (1) Akses, dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank. Kemampuan nasabah mengakses perbankan dimanapun dan kapanpun menjadi salah satu elemen penting dalam keuangan inklusif. (2) Penggunaan, dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan. (3) Kualitas, dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, juga terdapat faktor lain yaitu adanya inflasi.

Inflasi diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Untuk mengukur inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya menggunakan angka indeks (Bank Indonesia, 2009).

Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peran penting dalam sistem keuangan dalam perekonomian suatu Negara. Salah satunya adalah menjaga kesetabilan keuangan dalam perekonomian suatu Negara. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, yang secara otomatis ikut mendorong perkembangan lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Menurut Khotimah (2017), menyatakan bahwa lembaga keuangan baik bank dan non bank diharapkan memberikan informasi luas terkait dengan akses keuangan dan juga mempermudah masyarakat terutama masyarakat miskin maupun pelaku usaha mikro kecil menengah untuk memperoleh akses keuangan.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia sendiri pada saat ini cukup memuaskan. menurut data Statistik Perbankan Indonesia dari BI pada tahun 2019 tercatat ada 409 kantor cabang perbankan di Jawa Timur, dimana jumlah kantor cabang ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018 yang tercatat ada 433 kantor cabang di Jawa Timur. Dan jumlah DPK pada tahun 2019 sebanyak 588.322, yang jumlah setiap tahunnya terus meningkat. Berikut rincian data yang ada :

Tabel 1.1 Jumlah Kantor Cabang Bank dan Rekening Tabungan Dana Pihak Ketiga Di Jawa Timur

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kantor Cabang	415	430	432	433	409
Jumlah DPK Tabungan	425.832	458.066	502.607	547.590	588.322

Sumber: Bank Indonesia 2018

Berdasarkan perkembangan data tersebut, menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah kantor cabang bank yang ada di Jawa Timur selama tiga tahun pada tahun 2016 sampai 2018 yang sebanding dengan bertambahnya jumlah DPK rekening tabungan. Hasil dari data yang ada, meningkatnya jumlah bank-bank di Jawa Timur tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dimana masih terdapat masyarakat yang tidak ingin menggunakan jasa layanan perbankan. Dalam penelitian (Marlina, 2018) rendahnya minat pelaku UMKM menggunakan akses layanan keuangan disebabkan terbatasnya tingkat

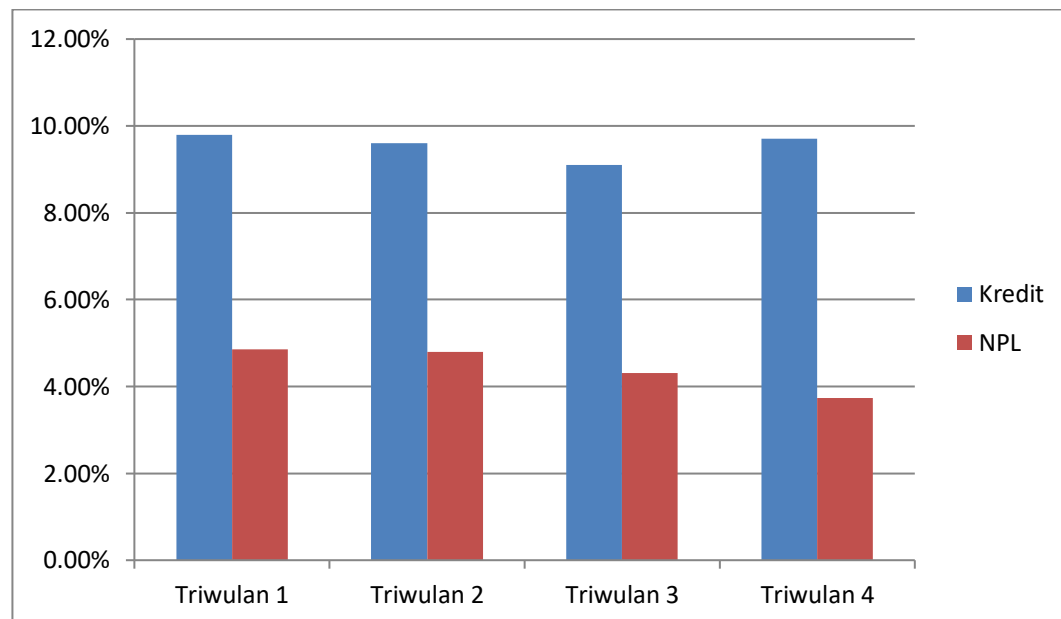
penetrasi perbankan, edukasi atau pembelajaran, akses transaksi pembayaran, akses tabungan, akses kredit dan terbatasnya akses pelayanan asuransi, sedangkan keterbatasan dalam mengakses layanan kredit karena tidak memiliki jaminan sesuai dengan syarat yang diajukan perbankan sehingga kredit yang diajukan ditolak dan tidak memperoleh pinjaman. Hal ini yang membuat pelaku UMKM enggan dan kesulitan mendapatkan pinjaman bank untuk mengembangkan usahanya (Choirunnisa, 2018).

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuli Rahmini Suci dalam jurnal yang berjudul Perkembangan UMKM Di Indonesia pada tahun 2017, menyatakan bahwa kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM untuk mencapai keberhasilan usaha meliputi kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan minimnya keterampilan mengorganisir usaha dan terbatasnya pemasaran hasil produksi.

Paparan hasil penelitian sebelumnya dibuktikan dengan data yang ada pada Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 jumlah rekening kredit UMKM perbankan sebanyak 75 rekening. Data tersebut dapat menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha UMKM yang tidak menggunakan jasa keuangan perbankan. Terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan ini memberikan dampak pada permodalan UMKM yang membuat para pelaku usaha UMKM kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan tersebut (Nurjannah, 2017).

Hal ini dibuktikan oleh data perbankan terkini yang menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan masih belum optimal khususnya pada sektor UMKM. Di tahun 2017 tercatat skala kredit UMKM masih belum mengalami perubahan dengan tingkat pertumbuhan yang masih dibawah 20%. Sementara

itu, tingkat penyaluran kredit konsumsi selalu berada diatas pertumbuhan kredit investasi maupun kredit modal kerja (Bank Indonesia, 2014). saat ini kredit juga sebagai alternatif permodalan oleh UMKM selain modal dana pribadi (Nurjannah, 2017).



Sumber: Bank Indonesia 2019

Gambar 1.1 Data Perkembangan Kredit UMKM di Jawa Timur Tahun 2019

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kredit UMKM di Jawa Timur pada tahun 2019 di triwulan 2 dan triwulan 3 mengalami penurunan, dibandingkan pada triwulan 1 yang mencapai 9,80%. Namun pada triwulan 4 pertumbuhan kredit mengalami peningkatan mencapai 9.70%, dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan ke 3 yang sebesar 9,10%.

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu acuan bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Semakin rendahnya tingkat NPL suatu daerah maka bank akan berani menyalurkan dananya dalam

bentuk kredit kepada masyarakat (Simaremare, 2013). Dapat dilihat dari tabel diatas, rasio *Non Performing Loan* (NPL), pada triwulan 1 tercatat rasio NPL sebesar 4,86%. Sedangkan pada triwulan 2 sampai triwulan 4 rasio NPL mengalami penurunan, dimana pada triwulan 4 rasio NPL tercatat sebesar 3,74% menurun dibandingkan rasio NPL pada triwulan sebelumnya sebesar 4,31%. Nilai rasio NPL tersebut tergolong masih rendah karena menurut Bank Indonesia besarnya *Non Performing Loan* (NPL) yaitu sebesar 5%.

Di dalam dunia perbankan, pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat dapat mengandung risiko berupa tidak lancarnya pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja bank yang biasa disebut dengan kredit macet atau *non performing loan*. Nilai NPL yang tinggi akan menyebabkan dana yang disalurkan melalui kredit juga akan semakin berkurang karena bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar. Tingginya NPL dapat mempengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya seperti bank akan menjadi lebih berhati-hati untuk memberikan kredit (Amelia, 2017).

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Bank Indonesia dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan ketersediaan data. Penulis menganalisis tentang “Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Perkembangan Kredit UMKM di Jawa Timur” untuk melihat secara jelas kaitan antara inklusi keuangan terhadap kredit UMKM dengan menggunakan dimensi akses, dimensi penggunaan dan inflasi sebagai variabel independen. Adapun kredit UMKM sebagai variabel dependen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat pengaruh inklusi keuangan terhadap perkembangan kredit UMKM di Jawa Timur?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap perkembangan kredit UMKM di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Banyak manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi para pembaca (umum) diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang sedang atau akan melakukan penelitian terkait dengan peran inklusi keuangan terhadap perkembangan UMKM.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sarana pembelajaran dan menambah wawasan dibidang keuangan yang berkaitan dengan inklusi keuangan.